



BUKU AJAR
PEREKONOMIAN INDONESIA

OLEH:

RENI RIA ARMAYANI HASIBUAN, M.E.I

NIP. 19880907 201903 2 011

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh

RENI RIA ARMAYANI HASIBUAN, M.E.I

NIP. 19880907 201903 2 011

KONSULTAN:

DR. MARLIYAH, M.AG

NIP. 19760126 200312 2 003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020

BAB I

PEREKONOMIAN SEBELUM KEMERDEKAAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu un:tuk

1. Memahami perdagangan bangsa
2. Memahami monopoli pemerintah
3. Memahami perekonomian abad voc
4. Memahami membangun sistem pemerintahan kolonial
5. Memahami sistem tanam paksa
6. Memahami kebijakan ekonomi liberal
7. Memahami sistem pemerintahan kolonial terbentuk
8. Memahami kesejahteraan rakyat
9. Memahami masa pendudukan jepang
10. Memahami masa revolusi

A. PERDAGANGAN BANGSA

Perdagangan adalah proses interaksi antara individu atau kelompok sosial yang satu dengan lainnya untuk memperoleh komoditas. Dalam perdagangan terkait empat komponen pokok, yaitu: orang yang mengadakan interaksi, barang atau komoditas, transportasi atau alat yang digunakan untuk memindahkan barang atau komoditas, dan kedua belah pihak yang terkait dalam perdagangan.

Tata niaga dalam konteks jaringan perdagangan dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk mengatur arus barang dan jasa, yaitu; bagaimana memperoleh dan mengumpulkan barang komoditi serta bagaimana mendistribusikan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Jika diposisikan pada konteks hulu dan hilir, maka upaya memperoleh dan mengumpulkan barang komoditi merupakan bagian hulu dalam sistem tata niaga. Dalam konteks lain, komponen utama yang mendukung tata niaga adalah produsen, pedagang, dan konsumen.

Ketiga komponen inilah yang saling terkait dalam sistem jaringan perdagangan. Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan rempah-rempah sebagai komoditi utama sejak awal masehi dengan adanya kontak antara pedagang Nusantara dengan pedagang Cina, Arab dan India. Jaringan perdagangan rempah-rempah ini kemudian semakin ramai dengan kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16, ditandai dengan penguasaan atas Malaka yang merupakan salah satu bandar penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Eropa ke kawasan

Asia tidak lepas dari keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran yang menghubungkan daratan Eropa dan Asia melalui Afrika.¹

Dunia Yunani-Romawi mengikuti perdagangan ini dengan berdagang di sepanjang jalur Dupa dan jalur Romawi-Hindustan. Di tengah milenium pertama, rute pelayaran ke Hindustan (sekarang India) dan Sri Lanka (Romawi - Taprobane) dikendalikan oleh Hindustan dan Ethiopia yang menjadi kekuatan perdagangan maritim Laut Merah.

Kekaisaran Aksum (sekitar abad ke-5 SM- abad ke-11 M) telah merintis rute Laut Merah sebelum abad ke-1 Masehi. Pada pertengahan abad ke-7 bangkitnya Islam berimbas pada ditutupnya rute darat kafilah yang melalui Mesir dan Kanal para Firaun, dan memisahkan komunitas perdagangan Eropa dari Aksum dan Hindustan.

Pedagang-pedagang Arab akhirnya mengambil alih pengiriman rempah-rempah melalui pedagang Levant dan pedagang Venesia untuk Eropa, sampai bangkitnya Turki Utsmani yang memotong rute lagi tahun 1453. Jalur darat pada awalnya membantu perdagangan rempah-rempah, tapi rute perdagangan maritim menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dalam aktivitas komersial. Selama periode Abad Pertengahan Tinggi dan Abad Pertengahan Akhir para pedagang Muslim mendominasi rute perdagangan rempah-rempah maritim di seluruh Samudera Hindia, mendapat keuntungan besar dari daerah sumber rempah-rempah di Timur Jauh (Asia Tenggara) dan mengirimkan rempah-rempah dari emporium perdagangan di Hindustan ke arah barat ke Teluk Persia dan Laut Merah, di mana rute darat menuju ke Eropa.

Perdagangan rempah-rempah kemudian diubah oleh zaman penjelajahan Eropa di kala perdagangan rempah-rempah, terutama lada hitam, menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting bagi para pedagang Eropa. Rute pelayaran dari

Eropa ke Samudera Hindia melalui Tanjung Harapan yang memutari Afrika dipelopori oleh penjelajah dan navigator Portugis Vasco da Gama pada tahun 1498, sehingga terciptalah rute maritim baru untuk perdagangan rempah-rempah.

Perdagangan rempah-rempah ini kala itu mendorong ekonomi dunia dari akhir Abad Pertengahan sampai ke zaman modern, dan akhirnya mengantarkan era dominasi bangsa Eropa di Dunia Timur. Kanal-kanal seperti Teluk Benggala, digunakan sebagai jembatan untuk pertukaran budaya dan komersial di antara beragam budaya kala negara-negara kala itu berjuang untuk menguasai perdagangan di sepanjang banyak rute rempah-rempah. Dominasi Eropa berkembang dengan lambat. Rute perdagangan Portugis umumnya dilarang dan dibatasi oleh penggunaan rute kuno, pelabuhan, dan negara-negara yang sulit untuk didominasi. Kerajaan Belanda kemudian mampu melewati banyak masalah ini dengan merintis rute laut langsung dari Tanjung Harapan ke Selat Sunda di Nusantara (sekarang Indonesia).

Ekspedisi pertama Belanda berlayar dari Amsterdam (April 1595) ke Hindia Timur (sekarang

¹Mansyur Syahrudin, *Jejak Tata Niaga Rempah Rempah Dalam Jaringan Perdagangan Kolonial*, (Ambon : Balai Arkeologi Ambon,2011), hal.21.

Indonesia). Konvoi lain Belanda berlayar pada tahun 1598 dan kembali satu tahun kemudian dengan 600.000 pon rempah-rempah dan produk Hindia Timur lainnya. Kongsi Perdagangan Hindia-Timur (VOC) menempha aliansi dengan produsen utama cengkih dan pala.

Sementara Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) mengirimkan sejumlah besar rempah-rempah selama awal abad ke-17. Memanasnya kompetisi perdagangan ini menyebabkan negara yang saling bersaing untuk beralih ke cara-cara militer untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1641, Maluku Portugis ditangkap oleh Belanda. Setelah penangkapan Maluku ini Belanda melihat perkebunan terkonsentrasi pada cengkih dan pala, dan kemudian menggunakan Perjanjian Batavia (1652) Belanda berupaya untuk menghancurkan pohon cengkih dan pala di semua pulau-pulau lain untuk menjaga pasokan dan mengontrol pasar penting rempah-rempah. Upaya ini mengganggu pola kuno perdagangan Nusantara dan bahkan menyebabkan depopulasi seluruh kepulauan, terutama Kepulauan Banda.

Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu mereka berada pada kondisi berperang satu sama lain.

Nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik seperti yang dimiliki Indonesia sekarang. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan itu merupakan aset yang penting bagi sebuah kerajaan dan seorang raja untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar dan berpengaruh. Namun, semakin global jaringan perdagangan itu, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk ke Nusantara; suatu perkembangan yang akhirnya mengarah pada kondisi penjajahan.²

B. MONOPOLI PEMERINTAH

Monopoli pemerintahan dalam bidang ekonomi, monopoli pemerintahan (monopoli Negara) adalah sebuah bentuk monopoli koersif dimana sebuah badan pemerintah atau perusahaan pemerintah menjadi penyedia tunggal dari barang atau jasa tertentu dan persaingan dilarang oleh hukum. Singkatnya, monopoli ini merupakan monopoli yang di buat oleh pemerintah jadi pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas system monopoli ini. Monopoli ini tidak sama dengan monopoli yang di anugerahkan oleh pemerintah dimana pemerintah memberikan monopoli kepada perusahaan tertentu³.

²Ibid, hal. 29.

³Wikipedia.org

1. Contoh monopoli pemerintahan

Contoh monopoli yang dilakukan oleh pemerintah dan kita gunakan sehari-hari adalah PT. PLN. Kebijakan monopoli pemerintah semacam ini merupakan kebijakan public yang baik, karena tujuan monopoli ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat bisa menikmati listrik yang terjangkau. Dimana monopoli ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mampu menguasai seluruh permintaan hal ini dikarenakan hanya ia yang menguasai sumber daya tidak ada yang lain. Dimana PT. PLN menguasai pasar listrik di seluruh Indonesia hal ini merupakan salah satu jenis monopoli artifisial dimana pemerintah sengaja membuat PT. PLN menjadi satu-satunya perusahaan penghasil listrik.

2. Factor penyebab monopoli

a) Hambatan teknis

Ketidakmampuan bersaing secara teknis membuat perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang ada contohnya perusahaan yang mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun.

b) Hambatan legalitas

Perusahaan bisa jadi memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Misalnya ketika cellophane diperkenalkan, DuPont memiliki kekuatan monopoli dalam proses produksinya karena memiliki hak paten. Demikian Xerox memiliki kekuatan monopoli atas mesin fotocopy dan palaroid atas produksi kamera foto langsung jadi.

3. Macam-macam monopoli

a) Monopoli alamiah, lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan lain bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak unggul tadi relatif menguasai pasar dalam jenis pasar tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa kendati secara historis pasar bebas lahir untuk menghapus monopoli yang dikenal dalam sistem ekonomi merkantilistis, pasar sendiri dapat melahirkan jenis monopoli tertentu berupa monopoli alamiah.

b) Monopoli artifisial, lahir karena persengkokolan atau kolusipolitik dan ekonomi antar para penguasa demi melindungi kepentingan kelompok usaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam negeri demi memnuhi ekonomi dan seterusnya. Pertimbangan irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa

dari yang samar-samar sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat.

4. Undang-undang anti monopoli

Di dalam UU RI NO.5 Tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat umum sudah di jelaskan mengenai monopoli, oligopoli dan suap.

Pembangunan jangka panjang pertama telah banyak menghasilkan kemajuan antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan ini yang telah di capai di dorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan di bidang ekonomi. Meskipun telah banyak kemajuan yang di capai selama pembangunan tetapi masih banyak pula tantangan dan persoalan khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, salah satunya adalah masalah pengusaha atau perusahaan besar swasta dimana banyak para petinggi perusahaan yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan social. Munculnya konklomerasi dan sekelompok pengusaha kecil yang kuat yang tidak di dukung oleh semangat kewirausahaan sejati salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Karena kondisi tersebut di susun lah undang-undang untuk mengawasi permasalahan tentang monopoli, oligopoli dan suap.

Secara umum materi dan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini mengandung 5 bagian pengaturan yang terdiri dari

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Komisi pengawas persaingan usaha
4. Penegakan hukum
5. Ketentuan lain-lain

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

C. PEREKONOMIAN PADA MASA VOC

Pada sejarah sistem ekonomi monopolistik, VOC terjadi sekitar tahun 1600–1800. Perkembangan sistem pasar di Indonesia tidak pernah mulus karena selalu tertekan oleh “sistem ekonomi” yang diterapkan di Indonesia sebagai “*negara jajahan*”. Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme (1600 – 1800), persatuan Pedagang Belanda (VOC) menerapkan sistem monopoli (monopsoni) dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah (lada

dan pala, cengkeh, kopi dan gula), sehingga harganya tertekan karena ditetapkan sepihak oleh VOC. Meskipun VOC tidak sama dengan pemerintah penjajah Belanda, tetapi petani Indonesia merasa VOC mempunyai kekuasaan dan daya-paksa seperti pemerintah juga karena VOC mempunyai aparat “pemerintahan”, bahkan memiliki tentara. Itulah sebabnya *Companie* diucapkan orang Indonesia sebagai kumpeni yang tidak lain berarti “tentara” yang dapat memaksa-maksa petani menyerahkan komoditi perdagangannya yang “dipaksa beli” oleh VOC.⁴

Pada awalnya orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Perdagangan orang Eropa ini dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi lautan yang berbahaya dalam jarak ribuan kilometer dengan kapal layar untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun para pedagang merasa perlu memiliki tempat yang permanen di daratan dari pada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Kantor dagang itu kemudian mereka perkuat dan persenjatai serta menjadi benteng yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah sekitarnya. Lambat laun kantor dagang ini beralih dari pusat komersil menjadi basis politik dan teritorial.

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) adalah kongsi dagang yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Tujuan pendirian ini adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat itu, ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah dari Timur (termasuk Indonesia), diantara penjajah Barat, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda.

Pada awal keberadaannya di Indonesia (Hindia Belanda), VOC tidak lain adalah sebuah kongsi dagang. Perdagangan bangsa Belanda di Indonesia dan di Asia pada umumnya tidak berbeda dari perdagangan bangsa-bangsa lainnya. Keuntungan perdagangan VOC merupakan hasil dari perdagangan antara Bandar-bandar di Indonesia, bukan dari hubungan perdagangan langsung antara Indonesia Belanda. VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya, Pada tahun 1603 VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yang tetap di Banten. Sedangkan pada tahun 1609 VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1610 Ambon dijadikan pusat VOC, yang dipimpin seorang-gubernur jenderal. namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa. Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol dan Portugis.

Dalam upaya mengatur urusan-urusan di Indonesia, VOC memandang perlu mengangkat gubernur jenderal, diantaranya yang paling terkenal adalah Jan Pieterszoon Coen yang diangkat pada tahun 1617. pada saat itu juga muncul kekuatan kongsi dagang dari Inggris (*East Indie Company* atau EIC). Kongsi dagang ini terletak di Banten. Sehingga adanya dua kongsi dagang ini

⁴Mubyarto, “Peran Ilmu Ekonomi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 17, No. 3, 2002, hal. 234.

mengakibatkan terjadinya perebutan daerah pengaruh yang akhirnya menimbulkan konflik diantara kedua pihak tersebut.

VOC mendirikan 3 buah pangkalan di Indonesia yakni di Jayakarta, Ambon, dan Banda pada tahun 1619. Pada saat itu terjadi kemerosotan perdagangan kota-kota pesisir Jawa. VOC dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini. VOC mengkonsentrasikan kegiatan perdagangannya di Jayakarta sehingga Jayakarta tumbuh menjadi Bandar terpenting di Jawa atas izin dari pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Di Indonesia terutama daerah Jawa, Ambon, dan Banda yang dijadikan pusat perhatian VOC, tujuan pembatasan daerah tersebut agar VOC dapat bebas menjalankan politiknya secara lebih teratur, terutama politik monopoli dagangnya.

Pada tahun 1641 VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Malaka kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Dari Malaka VOC mengadakan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di selat Malaka. Segala arus perdagangan Malaka disalurkan ke Jakarta, sehingga Jakarta menjadi bandar yang semakin ramai. Setelah berhasil merebut Malaka pada 1641, maka VOC mulai memusatkan perdagangannya di Indonesia.

Setelah VOC masuk ke Nusantara, pada masa ini banyak keterangan yang cukup lengkap tentang perdagangan Indonesia. Namun yang menjadi pokok adalah masih tetap eksport cengkeh dari Ternate, Ambon dan Seram, Buah pala dari kepulauan Banda, dan lada dari Sumatera, Banten dan Malaka. Sebaliknya, terdapat impor barang-barang timur lain, seperti porselin dan sutera dari Tiongkok, barang-barang kapas dari India, permadani-permadani dari Persia, dan sebagainya.⁵

VOC sebagai sebuah kongsi dagang memiliki hak istimewa yang sering disebut sebagai hak octroi. Adanya hak istimewa ini membuat VOC semakin kuat, diibaratkan negara dalam negara. Hak Octroi VOC antara lain:

1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara
2. Membentuk angkatan perang sendiri
3. Melakukan peperangan
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat
5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri
6. Mengangkat pegawai sendiri
7. Memerintah di negeri jajahan

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh VOC antara lain:

1. Monopoli perdagangan rempah-rempah
2. Verplichte Laverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC, dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.
3. Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.

⁵Ibid. hal. 244-245.

4. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
5. Hak Ekstirpasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.
6. Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.
7. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
8. Hak Ekstirpasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

D. MEMBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL

1. Imperialisme dan Kolonialisme

Imperialisme Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an, imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa (*Greater Britain*) karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika.

Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negaranegara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya.

Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (*hegemony*) oleh satu bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara - negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnosentrism, contoh bangsa Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia.

Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan sistem pemerintahan.

Sedangkan **Kolonialisme**, Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris.

Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal, untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498.

Diawali dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.

Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperiali.⁶

2. Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia

Pada mulanya para penjelajah (*explorer*) bangsa Eropa bertujuan untuk berdagang dan mencari sumber rempah-rempah. Namun demikian, akhirnya mereka melakukan penjajahan dan pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang disinggahinya. Tampak pada peta jalur pelayaran para penjajah Eropa yang melintas di kepulauan Nusantara.

⁶Ibid, hal 20-22

Jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani, maka berakhirilah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Berakibat tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa yang beroperasi di daerah kekuasaannya yang menyebabkan perdagangan antara dunia timur dengan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. Pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, pelaut-pelaut bangsa Eropa berhasil menjelajahi samudra yang luas dan sampai ke negerinegeri yang baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur termasuk Indonesia.

3. Penjelajahan Bangsa Portugis

Pada tahun 1498, raja Portugis mengirim ekspedisinya dibawah pimpinan Vasco Da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta (India) tahun 1498. Di daerah para pelaut Portugis mendapat rempah-rempah dari para pedagang untuk dibawa ke negerinya. Pada tahun 1511, dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisinya dibawah pimpinan Alphonso d'Albuquerque, mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Malaka pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Dari Malaka itu bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah yang ada di kepulauan Maluku. Akhirnya bangsa Portugis tiba di Ternate (Maluku) tahun 1512.

Perang yang terjadi antara Kerajaan Ternate dengan Tidore, juga merupakan perang antara bangsa kulit putih yaitu antara bangsa Spanyol dengan Portugis. Untuk menyelesaikan perkaitan kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan dan pada tahun 1521 dilakukan perjanjian Saragossa (Zaragoza). Isi perjanjiannya:

- a. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis.
- b. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Mexico ke arah barat sampai kepulauan Filipina dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazillia ke arah timur sampai kepulauan Maluku.

4. Indonesia Dibawah Pemerintahan Belanda

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan oleh:

- a. Persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris
- b. Penduduk di Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC
- c. Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC
- d. Pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan akibat dari gaji yang diterima kecil
- e. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup

besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.⁷

E. SISTEM TANAM PAKSA

Culturstelsel atau disebut juga Sistem Tanam Paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Motif utama sistem tanam (*culturstelsel*) paksa pada tahun 1830 adalah karena kesulitan financial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa tahun 1825-1830 di Indonesia di negeri Belanda sehingga Gubernur Jendral Van Den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutupi deficit anggaran pemerintah Belanda.

Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah.

Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa antara lain:

- a) Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman dagang yang dapat dijual dipasaran Eropa.
- b) Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- c) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.⁸
- d) Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

⁷Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas : praktek kolonial di Hindia Belanda*. (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 1995), hal. 50-51.

⁸Miftah Hermawati, "*Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi*", e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 1, No. 1, Januari 2013, hal.

1. Pelaksanaan tanam paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan. 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau *Vortsenlanden* tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%.⁹ Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem *cultuurstelsel* ini jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %. Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman.

Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain

⁹J. Thomas Linbald, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES. 2000), hal. 80.

sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan. Contoh yang nyata mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).¹⁰

F. KEBIJAKAN EKONOMI LIBERAL

Ketika kas Belanda telah surplus dan rakyat Hindia Belanda menderita akibat kebijakan *Cuulturstelsel*, munculah suara-suara dari karangan liberal yang menuntut dihapuskannya sistem itu dan digantikan dengan modal swasta dan kerja bebas (*Free labor*).

Pada pokoknya paham liberal yang sudah menjalar keseluruh eropa menghendaki agar segala kegiatan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta tanpa campur tangan pemerintah. Menurut paham liberal ini sebaiknya pemerintah menjauhkan diri dari peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan sebaiknya hanya membatasi diri pada pemeliharaan ketertiban umum dan penciptaan sarana-sarana hukum dan administratif yang memungkinkan usaha swasta untuk mengembangkan diri dengan baik¹¹.

Ternyata perjuangan proses liberalisasi ini merupakan perjuangan ideologi yang didukung oleh humanitarisme yang dicampur dengan kristianisme juga mulai memperhatikan nasib rakyat pribumi.

Dua orang Intelektual yang menyuarakan liberalisme adalah pendeta van Baron Hoevell dan Vitalis yang mendesak Tweede Kamer agar mengeluarkan Undang-undang untuk menghapuskan *culturstelsel*. Pada tahun 1860-an, desakan untuk menghapuskan *culturstelsel* ini makin menguat. Ketika pemerintahan konservatif yang mendukung *culturstelsel* jatuh, pemerintahan baru yang lebih liberal pada tahun 1862 membuat perubahan untuk melenyapkan *culturstelsel*. Setelah itu, *Cuulturstelsel* dihapuskan sedikit demi sedikit, yang paling pertama di hapuskan adalah tanaman pertanian yang kurang menguntungkan atau bahkan malah tidak menguntungkan sama sekali¹². Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang telah di hapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

1. Lada pada tahun 1862
2. Cengkih pada tahun 1864
3. Nila, teh dan kayu manis pada tahun 1865
4. Tembakau pada tahun 1866
5. Kopi dan gula pada tahun 1870

Pada tahun 1878 Undang-undang gula (*Zuickerwet*) menghapus tanam paksa gula dari gubernemen dan sekaligus membuat bebas perdagangan gula. Namun pada praktiknya, penanam kopi baru berakhir di Priangan pada awal tahun 1917 dan di pesisir utara Jawa pada Juni 1919. Dapat disimpulkan bahwa

¹⁰Zulkarnain, September 2010, "Serba-Serbi Tanam Paksa", ISTORIA Volume VIII No. 1, hal. 32-33.

¹¹Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 367.

¹²Ricklefs M C, "Sejarah Indonesia Modern 1200-2008", (Jakarta: Serambi, 2008), hal.270.

latar belakang dari kebijakan sistem ekonomi liberal ini adalah adanya pertentangan kaum konservatif versus kaum intelektual tentang *cuulturestelsel*, kaum konservatif masih tetap ingin menerapkan *cuulturestelsel* sedangkan kaum liberal ingin mengganti kebijakan *cuulturestelsel* dengan kebijakan liberal.

Di mulai setelah ada Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870 yang di sahkan oleh parlementer. UU agraria ini membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Keamanan dan kebebasan para pengusaha di jamin. Hanya orang Indonesia yang dapat memiliki tanah, tapi apabila orang asing ingin mengambil keuntungan dari tanah tersebut, orang-orang asing tersebut diperbolehkan untuk menyewa dari pemerintah selama 75 tahun dan dari pribumi bisa menyewa antara 5 s/d 20 tahun (sesuai kesepakatan).

Perusahaan-perusahaan swasta menyewa tanah penduduk untuk di jadikan perkebunan-perkebunan besar, setelah perkebunan di bangun, rakyat diberikan kesempatan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tersebut menjadi buruh musiman ataupun buru harian. Adapun lahan yang disewa adalah lahan kosong, tapi ada juga lahan persawahan. Tahun 1860-an nilai ekspor antar pemerintah Hindia Belanda dengan swasta itu nilainya sama, tahun 1885 ekspor swasta melebihi ekspor pemerintah bahkan sampai 10 kali lipat. Dari tahun 1870-an penyakit daun kopi mulai menyebar dan menyebabkan produksi kopi jatuh. Pada tahun 1882 hama gula menghantam Cirebon. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1892, hama ini gula menyebar ke ujung timur. Harga gula pada 1884 sangatlah terpuruk dan karna gula itu mendominasi Jawa, maka perekonomian Jawa ikut terdampak. Depresi bahkan melanda pedesaan sampai 1887-88.

Mengutip dari Sartono, kemunduran perekonomian antara 1878 dan 1883 disebabkan oleh perubahan harga bahan makanan di pasaran dunia, perubahan perbandingan harga produksi primer dan produksi sekunder atau industri, harga gula dan kopi jatuh. Sebagai reaksi atas krisis itu maka investasi modal mulai mengalir keusaha pertambangan, yaitu antara 1882-1887, antara lain tambang batu bara, timah, batu pualam, dan lain-lain.

Secara umum harapan dari ekonomi liberal ini adalah gagal karna rakyat Hindia Belanda semakin menderita sedangkan ekonomi Belanda semakin surplus. Hal itu berbeda terbalik dengan para pedagang China. Pedagang China ini malah menikmati kemakmuran. Para pedagang China mengalami keuntungan yang berlebih karna tidak terikat pada tradisi-tradisi dan norma-norma agraris yang masih dianut oleh penduduk di Jawa. Pertumbuhan penduduk terutama di Jawa sangat pesat. Hal itu di sebabkan karna menurunnya angka kematian sedangkan angka kelahiran tinggi, selain itu karna adanya kebijakan vaksinasi, perbaikan distribusi makanan serta perbaikan jalan raya.

Kebijakan Ekonomi Liberal adalah kebijakan yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1870-1900-an yang memiliki ciri yaitu adanya perusahaan swasta yang menguasai sumber-sumber pertanian dan perkebunan Hindia Belanda. Kebijakan Liberal ini menggantikan kebijakan *cuulturestelsel* yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Tapi pada kenyataannya kebijakan liberal

ini malah semakin mengeksploitasi SDA dan SDM rakyat Hindia sedangkan pemerintah dan pihak swasta menikmati kebijakan ekonomi liberal ini.¹³

G. SISTEM PEMERINTAH KOLONIAL TERBENTUK

1. Ekspedisi Pemerintah Belanda

Secara etimologi kata Hindia berasal dari bahasa latin, Indus. Nama asli Dutch Indies diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda” tercatat dalam dokumen *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada awal tahun 1620-an. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga dibawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi.

Pemerintah belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Ekspedisi militer diwilayah Sulawesi terlaksana pada tahun 1905 hingga 1906.

Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, dimana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian. Berdasarkan rancangan Idenburg kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir UU Desentralisasi adalah sebagai berikut: Kesatuan hukum (*Rechtsgemeenschappen*) teritorial yang baru dapat dibentuk di samping Hindia Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal (*ressorten van locale raden*) atau Swapraja lokal (*locale zelfbesturen*) atau “*local self government*”, sekarang dikenal sebagai daerah Otonom.

2. Dasar Pemerintahan Kolonial

Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan

Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar

¹³Sartono Kartodirjo, “*Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 dari Emporium sampai Imporium*”, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal.379.

mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, Kurasau, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (UUD, UU Legislasi Belanda, Peraturan dewan, dan perjanjian-perjanjian), atau kebijakan publik, selama peraturan itu bisa dibatalkan peraturan-peraturan Gubernur Jendral: Perundangan Hindia Belanda, Peraturan Majelis Legislatif (*Volksraad*).¹⁴

Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.

3. Konsep Politik Kolonial

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain;

- a. politik adalah usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama teori klasis aristoteles
- b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat,
- d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan, Birokrasi kolonial adalah sebuah instrumen resmi yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagai alat bagi penjajah untuk melakukan proses pengawasan terhadap wilayah jajahan sehingga mempermudah mengambil keuntungan yang diharapkan mampu memberikan surplus ekonomi bagi negeri induk. Inti dari kepentingannya adalah dalam bidang ekonomi dan penguasaan politik.

4. Sistem Pemerintahan Kolonial

Pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membeagi daerah-daerah otonom yang dikuasai

¹⁴Nur Laely, "*Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*", hal. 50-52.

Belanda menjadi *gewest* (provinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kota madya).

Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa.

Pada zaman kerajaan, peran bupati sebagai kepala daerah diangkat dari kalangan pribumi yang mempunyai kekuasaan otonom dalam menjalankan pemerintahan, tanpa ada pengawasan dari sultan. Pengawasan dari raja hanya ditunjukkan pada momen-momen politik tertentu saja, seperti tradisi menghadap raja (paseban) setiap tahun disertai dengan mengirim upeti kepada raja. Kondisi tersebut berubah pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Wewenang bupati dalam memerintah daerahnya tidak lagi otonom, melainkan telah dibatasi undang-undang dengan mendapat kontrol dari pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

H. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Belanda hanyalah iming-iming. Pada dasarnya seluruh perekonomian dikuasai oleh VOC. Hal ini semakin terlihat dengan adanya hak-hak VOC yang antara lain:

1. Hak untuk mencetak uang
2. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk member perjanjian dengan raja

Hak-hak ini mengakibatkan keadaan VOC sebagai penguasa, namun bukan berarti pula seluruh perekonomian Indonesia dikuasai VOC. kenyataannya, sejak 1602 VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa yaitu rempah-rempah. Kota dagang dan jalur pelayaran yang dikuasai adalah untuk menjamin monopoli atas dasar komoditi itu.

I. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Peralihan masa kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang merupakan lembaran sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia terus berlanjut. Walaupun terdapat perbedaan corak perlakuan antara Belanda dan Jepang, tetapi keduanya meninggalkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dengan mudahnya, Jepang mampu merebut

Indonesia dari kekuasaan Belanda. Satu per-satu tempat strategis yang ada di Nusantara berhasil direbut Jepang dari tangan Belanda. Tarakan merupakan wilayah Nusantara yang pertama kali jatuh ke tangan Jepang, yakni pada tanggal 12 Januari 1942. Akhirnya perlawanan Belanda terhadap serangan Jepang pun berakhir dengan ditanda-tanganinya perjanjian Kalijati oleh pihak Belanda dan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 yang juga menandakan dimulainya masa pendudukan Jepang.¹⁵

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang telah resmi menduduki Indonesia yang langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominansi Barat. Jepang memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan orang Indonesia dan inilah yang menjadi keuntungan tersendiri buat Jepang. Oleh karena itu, Jepang dapat dengan mudah menyebarkan semboyan tiga A mereka, yaitu:

1. Jepang Cahaya Asia
2. Jepang Pemimpin Asia dan
3. Jepang Pelindung Asia.

Dari semboyan ini berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai pembebas mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Selanjutnya Jepang sendiri menyadari bahwa besarnya pengaruh barat yang masih melekat pada diri rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa barat telah lama menjajah Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan Jepang secara berkala. Pertama yang mereka lakukan adalah melepaskan para pejabat Belanda yang mereka tangkap untuk melatih orang-orang Indonesia yang nantinya dapat mengambil alih tugas pemerintahan yang selama ini mereka kerjakan. Orang Jepang sendiri berkeinginan untuk mempekerjakan orang Indonesia sebagai bentuk untuk merealisasikan cita-cita “Asia untuk Asia” seperti yang selama ini didengungkan.¹⁶

Kebijakan pemerintahan Jepang dalam melakukan sistem pengaturan di bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, *Meiji Seilyo Kaisya* dan *Okinawa Sello Kaisya*. Dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan di antaranya sebagai berikut.

1. Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang)
2. Sistem tonarigumi (organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang)
3. Memonopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh *Gunseikan*

¹⁵M.Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang”. Jurnal Sejarah dan Budaya. Vol. 13, No. 2. 2019, hal. 190.

¹⁶Ibid.,

4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Dalam bidang sosial diberlakukannya *Romusha*, karena melihat dari praktek-praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah banyak menghancurkan sumber daya alam, sehingga menimbulkan krisis ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk *Kinrohosi* atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Kemudian semakin luasnya daerah pendudukan Jepang, memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu, lapangan udara, jalan raya dan gudang bawah tanah. Tenaga yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya, sehingga kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa istilah terkenalnya *Romusha*. Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun terdesak oleh perang pasifik sehingga pengerahan tenaga diserahkan kepada *Romukyokai* yang ada di setiap desa. Banyak tenaga *Romusha* yang tidak kembali dalam tugas sebab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi.¹⁷

Kasus penimbunan barang ternyata memiliki akar dari era pendudukan Jepang. Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam kasus penimbunan barang pada periode penjajahan Jepang. Kegagalan dalam melalui proses transisi mata uang dari gulden ke uang Nippon menjadi menjadi sumber pertama. Ketidakpercayaan kelompok pedagang, yang sebagian besar keturunan Cina, terhadap mata uang Nippon menjadi penyebab mereka enggan melepas barang ke pasar.

Penimbunan ini juga berkaitan dengan kelangkaan barang. Mekanisme ekspor-import yang pada era kolonial mendorong sirkulasi barang di pasar pada masa Perang Pasifik terhenti. Terhentinya aktivitas perekonomian di Selat Malaka, Laut China Selatan dan perairan Pasifik berdampak pada arus lalu lintas barang. Ini mengakibatkan arus barang impor menjadi berhenti dan berdampak pada kelangkaan barang. Ada situasi kejiwaan tertentu dimana pedagang akan mengamankan barang ketika suplai tidak begitu lancar. Ini merupakan faktor yang melatarbelakangi penimbunan barang.

Anomali ekonomi yang berdampak pada suplai barang-barang kebutuhan penting ini nampaknya tidak begitu dipahami oleh masyarakat kota. Persepsi negatif yang ber-nuansa rasial menjadi tumbuh dan ber-kembang menjadi dendam. Sentimen ini semakin kuat ketika penggerebekan yang dilakukan polisi ternyata membenarkan praduga pada penduduk yang menganggap barang itu ditimbun di suatu tempat. Sentimen ini ibarat sekam kering yang hanya membutuhkan sepercik api untuk membakar-nya. Kasus kekerasan rasial yang terjadi di Malang pada akhir Juli 1947 merupakan bukti adanya dendam dan sikap antipati terhadap kelompok pedagang Tionghoa. Pe-misahan penduduk menurut ras yang merupakan warisan sistem administrasi ke-pendudukan dan hukum kolonial Belanda telah menciptakan semacam jejak sejarah yang tidak

¹⁷ M.Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari. “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang”. Jurnal Sejarah dan Budaya. Vol. 13, No. 2. 2019, hal. 201.

hilang dalam waktu singkat. Anomali ekonomi yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di kota Malang tersebut telah membuktikan adanya kesinambungan dalam sejarah. Sekalipun rezim telah berubah, sebuah gejala sosial dengan pola yang sama masih mungkin terulang kembali jika ada kondisi yang mendukung.¹⁸

J. MASA REVOLUSI

1. Revolusi Nasional

Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama sekitar empat tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis.

Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta dua intervensi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatra, tetapi gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia; kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan "revolusi sosial", yang terjadi di beberapa bagian di pulau Sumatra.

Revolusi dapat dilihat sebagai loncatan dua tahap, pertama, loncatan dari penjajahan ke alam merdeka, dan kedua, loncatan dari masyarakat yang diwariskan oleh zaman penjajahan dan perang kemerdekaan yang bertahun-tahun ke suatu masyarakat Indonesia yang modern, adil, makmur dan mencerminkan kepribadian kita dan yang mempunyai swadaya untuk perkembangan yang terus-menerus. Kondisi politik, sosial ekonomis, kebudayaan, menyebabkan pengertian revolusi itu erat hubungannya dengan kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa revolusi, dan tidak ada revolusi tanpa kemerdekaan.¹⁹

Pada masa kemerdekaan, di Indonesia terjadi suatu perubahan yang fundamental dan dalam waktu yang singkat, perubahan dari bangsa yang terjajah beralih menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sendirinya terjadi juga perubahan struktur dari pemerintahan selama penjajahan ke alam struktur pemerintahan yang baru dari bangsa yang merdeka. Semua berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Dilihat dari sudut yang lain, yaitu dari sudut kenegaraan, maka

¹⁸ Reza Hudiyanto, "Menimbun Barang Menuai Prasangka Ekonomi Kota Malang Pada Era Pemerintahan Jepang (1942-1945)".

Jurnal Sejarah dan Budaya. Vo. 8. No. 1. 2014, hal. 80-81.

¹⁹TB. Simatupang, *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: Idayu, 1981),

selama revolusi tersebut sebenarnya terjadi peperangan antara Indonesia yang merdeka dan kerajaan Belanda sebagai lawan, karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang berhubungan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka ia disebut perang kemerdekaan.²⁰ Masa perang kemerdekaan ini berlangsung dari tahun 1945-1949. Bangsa Indonesia memerlukan lebih dari empat tahun untuk menyelesaikan konflik mengenai kedaulatan atas negaranya. Dalam waktu empat tahun itu terkadang berlangsung pertempuran, terkadang perundingan dan kadangkadang pertempuran berlangsung bersamaan dengan perundingan. Dua kali Belanda mengadakan serangan secara besar-besaran dan terang-terangan. Mereka menyebut serangan-serangan itu dengan Aksi Polisionil Pertama dan Kedua, sedangkan bangsa Indonesia menyebutnya dengan Agresi Militer Belanda Pertama dan Kedua. Jadi secara keseluruhan kurun waktu antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dapat disebut sebagai Perang Kemerdekaan.²¹

2. Kebijakan Sistem Pembayaran Masa Revolusi

Hal terpenting yang harus dilakukan di tengah perjuangan kemerdekaan adalah penciptaan suatu identitas yang dapat menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan identitas tersebut adalah melalui penciptaan mata uang. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan muncul desakan kepada pemerintah RI untuk segera mengeluarkan mata uang Republik Indonesia. Sebelumnya karena banyaknya jenis mata uang yang beredar, pemerintah RI terlebih dahulu menetapkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI. Pertama, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI tanggal 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah RI. Berikutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan beberapa jenis uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.²²

²⁰A. H Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, (Bandung: Angkasa, 1980),

²¹Saleh A. Djamhari, *Markas Besar Komando Djawa*, (Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1967), hal. 14.

²²Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "*Sejarah Pra Bank Indonesia*", hal. 4.

